BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiai dan politik merupakan dua entitas yang sering diperbincangkan menyangkut peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Keduanya secara sengaja ataupun tidak sering bertemu dan dipertemukan dalam ruang diskusi maupun dalam kenyataan sesungguhnya.[1]

Kiai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, kiai memiliki jemaah komunitas dan masa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jemaah, komunitas dan masa yang dipimpinnya.[2] Jelasnya, kiai menjadi seorang yang dituakan oleh masyarakat, atau menjadi bapak masyarakat terutama masyarakat desa.

Kiai adalah seorang pemimpin sekaligus guru yang lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan yang mengarah pada "*uswatun hasanah*" keteladanan yang baik, dari sekedar mengajar (*transfer of knowledge*), kiai harusnya mendidik sebelum mengajar, sekaligus menerapkan akhlak yang baik dalam kesehariannya.

---

[1]Khoirudin, *Politik Kiai Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis* (Malang: Averroes Pres, 2005), h. 1.

[2]Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 39-40.

Karenanya tidak semua orang yang berilmu layak mendapat sebutan kiai, untuk bisa meraih gelar itu selain dituntut sebagai pengemban ilmu juga harus menjadi pengamal ilmu yang diembannya (*'alim* dan *'amil*). Selain itu itu kiai juga bertugas mensyiarkan dan memasyarakatkan ilmunya dalam rangka memberikan informasi (*Tabligh*), disertai penjelasan yang bertanggung jawab (*Tabyiin*) guna memberikan solusi berbagai problem umat, juga bimbingan (*Irsyad*) dan tuntunan (*Taujihat*). kiai juga bertugas sebagai penengah (*Hakam*) dan pengayom yang arif dan bijak dalam menyelesaikan segala macam konflik yang dihadapi umat dengan mengedepankan keteladanan yang baik. Hal ini dikarenakan mereka mewarisi "*Risalah Nabawiyah*" atau tugas-tugas pokok para Nabi, dalam ucapan, ilmu, ajaran, amaliah juga mental dan moralitasnya. Juga dikarenakan mereka berpegang pada firman Allah dalam surat Asshoff ayat 2-3: [3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ . (الصّفّ 61: 2-3)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. Asshoff: 61: 2-3).

Kriteria kiai versi Alquran di atas ternyata tidak beda jauh dengan kriteria konvensional dalam penilaian masyarakat muslim secara sederhana, bagi orang awam, seseorang layak disebut sebagai kiai apabila paling tidak memiliki kadar ilmu dan ketaqwaan yang lebih dari orang kebanyakan sekaligus mampu

[3]Abu Bakar Assegaf , Antara Kiai Politik Dan Politik Kiai, *http://abubakarassegaf.blogspot.com/2009/05/antara-kiai-politik-dan-politik-kiai.html*, 9/10/2011.

memahami kemaslahatan umat. Berdasar hal-hal tersebut di atas realita telah membuktikan bahwa kedudukan luhur kiai tersebut menjadikan masyarakat memandang mereka tidak hanya sebagai pemuka Agama, tapi juga sebagai pemimpin (*umara*) dan kiblat serta panutan bagi umatnya, sehingga pandangan, keputusan dan fatwa-fatwanya mudah sekali diikuti masyarakat. Posisi strategis itulah yang memungkinkan mereka selalu berinteraksi dengan negara dan pemerintahan dalam "perspektif politik".

Dalam hal politik, kiai seyogyanya menganut *traditional religio political system* yaitu sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tidak memisahkan antara komunitas politik dan komunitas keagamaan. Ironisnya justru hal itulah yang malah menempatkan mereka dalam posisi yang rumit dan dilematis. Karena mereka harus membawa menu agama yang basisnya murni spiritual kepada politik praktis. Sebenarnya upaya memadukan agama dengan politik itu sah-sah saja, tapi persoalannya seberapa jauh persentuhan itu tidak membuat kiai menjadi korban kepentingan politik jangka pendek dan memancing ketegangan diantara mereka dan diantara para pendukungnya. Lalu sejauh mana pesan luhur agama yang mereka bawa telah dapat memberikan makna moralitas bagi proses politik yang cenderung menghalalkan segala cara dalam mengejar jabatan (*riyasah*).[4]

Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kiai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural-politik-relegius menyebabkan kiai menempati posisi kelompok elit dalam struktur sosial dan politik di masyarakat. Kiai sangat dihormati oleh masyarakat melebihi

[4]*Ibid.*,

penghormatan mereka terhadap pejabat setempat. Petuah-petuahnya memiliki daya pikat yang luar biasa, sehingga memudahkan baginya untuk menggalang masa baik secara kebetulan maupun terorganisasi. Ia memiliki pengikut yang banyak jumlahnya dari kalangan santri dalam semua lapisan mulai dari anak-anak sampai kelompok lanjut usia.[5]

Sebagai pemimpin keagamaan, figur kiai dicitrakan sebagai orang yang bersih dari kepentingan (*free from value*) terutama dari hal-hal duniawi, menjadi panutan dalam tindakan dan perilakunya di mata umat serta diyakini sebagai pewaris ajaran nabi. Zamakhsyari Dhofier dalam penelitiannya tentang tradisi pesantren menyebutkan;

> Kiai memperoleh tempat istimewa dalam struktur sosial di mata masyarakat. Sebagai suatu kelompok mereka memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dan merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam agama Islam seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh orang awam.[6]

Sekalipun misalnya, kiai sebenarnya tidak berminat dalam aktivitas politik, tetapi karena mereka dipandang memiliki pengaruh di masyarakat, maka pihak-pihak tertentu ingin memanfaatkan pengaruh itu. Di masyarakat tertentu, kiai sangat dihormati sehingga apa yang dikatakan oleh mereka selalu diikuti, sehingga jika seseorang atau partai politik mendapatkan dukungan politik dari kiai, sama artinya mendapat dukungan dari seluruh jama'ahnya.

---

[5]Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tth), h. 29.

[6]Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.* Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 55-57.

Memang, ada kiai yang secara sengaja selalu berusaha terlibat dalam politik praktis. Niat itu semula mulia, yaitu ingin menjadikan politik sebagai media dakwah, kiai melihat bahwa berdakwah melalui politik sangat efektif. Jika seorang bupati, walikota, gubernur dan bahkan presiden dekat dengan Islam, maka setidak-tidaknya dakwah yang dilakukan oleh kiai tidak terhambat.[7]

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis baik di kalangan masyarakat maupun di media masa (internet) terdapat pro dan kontra terhadap kiai yang ikut berperan dalam kancah politik, ada yang mendukung namun ada pula yang tidak mendukung. Bahkan dikalangan intelektualpun mempunyai perbedaan pendapat tentang hal ini, seperti di kalangan dosen misalnya, dari observasi awal yang dilakukan penulis terhadap pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin penulis menemukan adanya perbedaan pendapat terhadap peran kiai di dalam politik. Ada yang beranggapan bahwa lebih baik kiai menetralkan diri tidak ikut berkecimpung di dalam ranah politik praktis melainkan cukup sebagai kontrol sosial, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sah-sah saja kiai ikut dalam dunia politik karena kiai akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya yaitu di bidang keagamaan.

Beranjak dari beragam asumsi di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran kiai di dalam politik dimana dalam pembahasannya penulis akan meneliti pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang peran kiai di dalam politik tersebut. Karena penulis beranggapan bahwa dosen Fakultas Syariah merupakan salah satu dari

---

[7]Admin, *kiai dan politik*, http://uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=701%3A07-02-2009&catid=25%3Aartikel-rektor&Itemid=171, 15/06/2011.

kaum intelektual yang mengerti akan permasalahan dalam bidang politik, sehingga dengan demikian sedikit banyaknya mereka mempunyai pengetahuan tentang permasalah yang akan penulis angkat.

Dari permasalahan tersebut penulis menuangkannya dalam sebuah naskah skripsi dengan judul: "PENDAPAT BEBERAPA DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN TERHADAP PERAN KIAI DI DALAM POLITIK".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap Peran Kiai di Dalam Politik?
2. Apa alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah kepada siapa saja yang memerlukan dan terutama kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmu kesyariahan khususnya dalam bidang Siyasah Jinayah.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat yaitu pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.[8] Yang dimaksud dengan pendapat dalam penelitian ini yaitu anggapan dari hasil pemikiran dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik.
2. Peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.[9] Dalam penelitian ini peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seorang kiai ketika berada di dalam politik.

---

[8]Admin, *Definisi Pendapat*, http://www.artikata.com/arti-362169-pendapat.html, 20/06/2011.

[9]Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

3. Politik yaitu (pengetahuan) mengenai ketata negaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat,) mengenai pemerintahan negara, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.[10] Yang dimaksud politik dalam penelitian ini adalah segala urusan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang kiai.
4. Kiai, yaitu sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam.[11] Kiai dalam pengertian disini adalah alim ulama yang masuk dalam dunia politik.

Jadi yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini adalah meneliti tentang pikiran atau anggapan dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap alim ulama yang memainkan fungsinya pada urusan ke negaraan/pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Ketertarikan penulis dalam mengangkat permasalahan ini ketika penulis menemukan adanya wacana di masyarakat yang memperbincangkan tentang keterlibatan kiai dalam politik, begitu pula ketika penulis menelusuri lebih lanjut melalui media masa ternyata perihal mengenai kiai dan politik merupakan topik yang menarik dan cukup banyak dibahas. dan beberapa penelitian terdahulu juga ada yang membahas tentang permasalahan tersebut.

---

[10]Kamus Bahasa Indonesia Online, *politik*, http://kamusbahasaindonesia.org/politik, 20/06/2011.

[11]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,1988). h. 437.

Sepengetahuan penulis berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh; *M. Nasir Danhas*, NIM. 0201135089 yang berjudul: Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Ulama dalam berpolitik di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Disini yang dipaparkan adalah masalah bagaimana persepsi masyarakat tentang keterlibatan ulama dalam berpolitik di kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Hal ini tentu berbeda dengan masalah yang akan penulis teliti, yang mana masalah yang penulis teliti adalah tentang pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik. Kemudian ada juga penelitian oleh *Mukhliansyah*, NIM. 0401136288 yang berjudul: persepsi masyarakat Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap keberadaan ulama dalam partai politik. Yang lebih ditekankan dalam penelitian itu adalah bagaimana persepsi masyarakat serta apa alasan yang dikemukakan masyarakat kecamatan Kandangan dalam memberikan persepsi. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, baik dari segi subyek maupun objek penelitian. Dimana jika digambarkan secara umum dalam penelitian terdahulu telah menitik beratkan permasalahannya kepada persepsi masyarakat dan keterlibatan ulama dalam ranah politik dan juga pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pendapat beberapa dosen dan Peran Kiai di dalam politik dengan subyek penelitiannya adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari

Banjarmasin. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam pengkajian masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelaahan terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, diantaranya adalah perilaku politik kiai karya khoiro ummatin yang memaparkan bahwa kiai sebagai elit dalam masyarakat NU menempati posisi strategis dan memiliki otoritas. sebagai elit, keberadaan kiai pesantren tidak saja diakui sebagai elit sosial politik NU, tetapi kiai pesantren juga diakui sebagai elit sosial masyarakat. Oleh karena itu, kiai pesantren harus pula berkompetensi secara eksternal dengan elit masyarakat lain,[12] Kalau keberadaannya ingin mendapat pengakuan pada sumber kekuasaan yang lebih luas. Keberadaan kiai pesantren ini tetap memiliki kelebihan dibanding dengan elit lain, sebab ketokohan kiai pesantren sekaligus ditempatkan sebagai penyangga budaya yang masuk ke pesantren.

Selain itu ada lagi buku yang di karang oleh Imam Suprayogo yang berjudul “Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kiai” yang berusaha memaparkan bentuk keterlibatan kiai dalam politik, dan mengemukakan tiga alasan mengapa kiai terlibat dalam persoalan politik. *Pertama,* ditelusuri dari sumber ajaran agama Islam sendiri (Alquran dan Hadits) yang memiliki lingkup tidak hanya pada aspek ritual dan bimbingan moral, tetapi juga pada nilai-nilai di semua sisi kehidupan, baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, maupun persoalan politik. *Kedua,* dilihat dari sisi sejarah, keterlibatan kiai dalam politik bangsa ini tidak saja dapat dilihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah,

[12] Khoiro ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002) h. 29.

melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplomasi, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan diproklamasikan. *Ketiga*, posisi kiai sebagai elit agama yang memiliki pengikut (*jamaah*) dan pengaruhnya yang kadangkala begitu luas di tengah-tengah masyarakat, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan kemasyarakatan.[13]

Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kiai dipandang memiliki kemampuan ”luar biasa” untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap ”fatwa” politik yang terakhir untuk diikuti.[14]

Ketika kiai telah mamasuki dunia politik praktis yang tadinya tugas pokok kiai sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. adalah kenabian, bukan kekuasaan politik yang mana keduanya sesungguhnya mempunyai domain atau wilayah kerja dan “teritorial” yang sama sekali berbeda tentunya menuai kontroversi di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

---

[13]Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kiai*, cet. II, (UIN-Malang: Malang, 2009), h. 2-3.

[14]Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, http://www.fsrd.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/3-Miftah.pdf, 13/06/2011.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum pada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang peran kiai di dalam politik. Bab ini merupakan landasan teoritis yang akan di paparkan secara umum yaitu meliputi mengenal makna kiai, politik Islam, politik kiai, orientasi politik kiai, politik dalam pandangan kiai, dan implikasi keterlibatan kiai dalam politik.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mencakup jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan bab inti yang memuat laporan hasil penelitian dan analisis, meliputi penyajian data mengenai pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya. selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif terhadap pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya.

Bab kelima adalah bab terakhir sebagai penutup. Bab ini terbagi atas dua sub bab. Sub bab pertama adalah simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan. Selanjutnya sub bab kedua adalah saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan.